PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SEKAPAS-SEKELADI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022-2023

Oleh : Yanofita Sari

Pembimbing: Sofyan Hadi., S.Sos., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The role of government is very important in designing and facing economic development problems. The size of the government's role determines how these problems are resolved. Development is a process of advancing or improving conditions through various stages in a planned and sustainable manner which aims to change people's lives towards better change. The problem in this research is the lack of good road access and the lack of local government commitment in building the Sekapas to Sekeladi road. The purpose of this research is to determine the implementation of the construction of the Sekapas-Sekeladi causeway in Rokan Hilir Regency and determine the factors inhibiting the construction of the Sekapas-Sekeladi pass by referring to the Government Management theory according to Purnamasari, Hanny, Ramdani, 2018, namely Government Planning, Organizing, Actuating and Controlling. This research is a qualitative descriptive research with the main data sources in the form of primary data and secondary data. The data collection techniques used were interview and documentation techniques. This data analysis technique is Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Drawing. The results of this research are that the road construction process in Sepakapas-Sekeladi Village has not been carried out well due to several inhibiting factors, namely natural disasters such as floods, insufficient budget and lack of supervision from the government in implementing it. construction of this causeway.

Keywords: Planning, Organizing, Actuating, Controlling

ABSTRAK

Peran pemerintah sangat penting dalam merancang dan menghadapi permasalahan pembangunan ekonomi. Besar kecilnya peran pemerintah menentukan bagaimana permasalahan tersebut diselesaikan. Pembangunan adalah suatu proses memajukan atau memperbaiki keadaan melalui berbagai tahapan secara terencana dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya akses jalan yang baik dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam membangun jalan Sekapas hingga Sekeladi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan jalan lintas Sekapas-Sekeladi Kabupaten Rokan Hilir dan mengetahui faktor penghambat pembangunan jalan lintas Sekapas-Sekeladi dengan mengacu pada teori Manajemen Pemerintahan

menurut Purnamasari, Hanny, Ramdani, 2018 yaitu Perencanaan Pemerintah, Pengorganisasi, Pelaksanaan dan Pengawasan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data utama berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data ini adalah Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah proses pembangunan jalan di Desa Sepakapas-Sekeladi belum terlaksana dengan baik karena beberapa faktor penghambat yaitu adanya bencana alam seperti banjir, anggaran yang tidak mencukupi dan kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam melaksanakannya. pembangunan jalan lintas ini.

Kata Kunci: Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Peran pemerintah sangat penting dalam merancang dan menghadapi masalah pembangunan ekonomi. Seberapa jauh peran pemerintah menentukan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Peran itu dapat dilihat dari sikap pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Peran pemerintah adalah sebagai pengatur kebijakan masalah pembangunan ekonomi, pemerintah juga yang mengatur bagaimana pelaksana rancangan pembangunan, apakah sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Pembangunan merupakan suatu proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Untuk mewujudkan keberhasilan suatu pembangunan yang optimal tentu diperlukan upaya pembangunan diperlukan suatu kerja sama antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengambil suatu kebijakan guna penyaluran pembangunan diberbagai daerah.

Pembangunan infrastruktur yang baik akan memberikan peran yang penting dalam meningkatkan

aksesibilitas, secara umum mempengaruhi pada terpacunya pertumbuhan ekonomi, yang berimplikasi nyata pada upaya pengentasan kemiskinan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Panjaitan, Mulatsih, & Rindayati, 2019)

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional yang harus tetap dilanjutkan, yang membuka akses ekonomi dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. (Suroso, 2015)

Pada Undang-undang Dasar Tahun 1945 pemerintahan daerah yang terdiri dari Pemerintah daerah provinsi yaitu Gubernur, Pemerintah daerah Kabupaten yaitu Bupati dan Pemerintah Walikota bertanggung jawab atas Pembangunan disuatu daerah. Dimana di jelaskan dalam Undang-undang Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (2) yang menyatakan : "Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". (<https://www.mkri.>,2021)

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah bahwa perencanaan

pembangunan yang sistematis, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Pembangunan juga diartikan sebagai proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Perencanaan pembangun perlu diwujudkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026, di dalam RPJMD diwujudkan pada visi misi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 adalah menuju Rokan Hilir yang maju, religius dan berbudaya berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. (<https://jdih.rohilkab,2021-2026>)

Misi Kabupaten Rokan Hilir di antaranya :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar wilayah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Rokan Hilir.
2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul, berbudaya dan berdaya saing dengan berbasis nilai-nilai religi.
3. Meningkatkan mutu dan layanan dasar yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir.
4. Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah (Pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif).
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif

dan efisien berbasis teknologi serta mengupayakan pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK).

Salah satu permasalahan yang ada di Desa Sekapas yaitu minimnya akses jalan yang baik. Jalan yang menghubungkan Desa Sekapas ke Desa Sekeladi ini merupakan akses utama bagi masyarakat untuk melintas. Mengingat pembangunan infrastruktur jalan sangatlah penting bagi masyarakat. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi termasuk pembangunan jalan. Persoalan pembangunan jalan lintas masih dianggap sebagai masalah utama bagi masyarakat karena jalan merupakan fasilitas penting bagi manusia agar dapat mencapai suatu daerah yang ingin dicapai. Berbagai masalah yang terjal di masyarakat muncul tidak terkecuali yang terjadi pada pemerintahan daerah yang tidak komitmen dalam pembangunan jalan lintas Sekapas ke Sekeladi. Pada kenyataannya jalan lintas Sekapas ke Sekeladi ini rusak parah.

Tabel 1.1 Ruas Jalan Desa Sekapas-Sekeladi 2022-2023

Panjang Jalan Lintas Sekapas-Sekeladi	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
25, 86 Kilometer	14,8 Km	4,4 Km	4,06 Km	2,94 Km

Sumber : Database Kabupaten Rokan Hilir

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwa jalan Desa Sekapas-Sekeladi menurut SK Jalan Kabupaten Rokan Hilir nomor 255 tahun 2018 tercatat dengan nama ruas jalan Lintas Sekapas-Sekeladi yang melalui Kecamatan Rantau Kopar dan Kecamatan Tanah Putih dengan panjang ruas 25,86 kilometer. Dengan kondisi baik 14,8 kilometer, kondisi sedang 4,4 kilometer, kondisi rusak ringan 4,06 kilometer dan kondisi rusak berat 2,94 kilometer berdasarkan hasil survei tahun 2023. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan khususnya jalan Lintas Sekapas-Sekeladi dengan melakukan pembangunan secara bertahap pada ruas jalan dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan dalam rangka meningkatkan kemandirian jalan.

Kurangnya komitmen pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam pembangunan infrastruktur jalan, kebutuhan jalan atau akses transportasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai jalur untuk menghubungkan mobilitas masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lainnya dimana infrastruktur jalan sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi.

Infrastruktur jalan yang bagus dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan barang yang menghubungkan satu pusat aktivitas dengan pusat aktivitas lain di area Desa Sekapas-Sekeladi yang menghubungkan

dua wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir.

Respon masyarakat sebagai pengguna jalan juga tidak bisa di kategorikan baik karena warga di sekitaran lingkungan masih banyak yang menggunakan jalan tidak sebagaimana mestinya dengan membawa alat-alat berat untuk kebutuhan di perkebunan sekitar yang mempercepat kerusakan jalan yang sudah di perbaiki sebagian.

Makanya dalam hal ini kepemimpinan yang dilakukan seorang pemimpin salah satunya adalah menjaga kestabilan komunikasi melalui koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam program kerjanya. Bupati membuat rancangan awal mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian dikomunikasikan terkait perihal apa saja yang ada di dalamnya untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena Bupati bertanggungjawab terhadap segala hal umum yang terjadi dan dibutuhkan selama proses Pembangunan termasuk perihal anggaran kepada DPRD untuk dapat disetujui dan kemudian direalisasikan oleh pihak yang bertugas di lapangan dalam mengeksekusi pembangunan yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dari permasalahan di atas maka penting dilakukan penelitian awal dengan tema yaitu : Peran Pemerintah Dalam

Pembangunan Jalan Lintas Sekapas – Sekeladi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2023.

Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Pembangunan Jalan Lintas Sekapas-Sekeladi Kabupaten Rokan Hilir ?.
2. Apa saja faktor penghambat pembangunan jalan lintas Sekapas-Sekeladi Kabupaten Rokan Hilir ?.

KERANGKA TEORITIS

1. Manajemen Pemerintahan

Menurut (Purnamasari, Hannya, Ramdani, 2018), Teori Manajemen Pemerintahan didukung dengan empat variabel diantaranya :

- (1) Perencanaan
- (2) Pengorganisasian
- (3) Pelaksanaan
- (4) Pengawasan

1. Perencanaan adalah langkah awal yang harus diperbuat dalam sebuah organisasi dalam memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Planning dalam hal ini mencakup kegiatan pengambilan keputusan.
2. Pengorganisasian adalah pengelompokkan sebagaimana orang didalamnya dapat digerakkan sesuai aturan dan sesuai rencana dalam mencapai tujuan. Maka dalam hal ini perlu adanya

perencanaan yang baik dalam membuat sebuah struktur organisasi karena sangat berdampak pada proses keberhasilan.

3. Pelaksanaan adalah tindakan dari seorang pemimpin yang membimbing serta mengarahkan dan menggerakkan seluruh anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan baik dan tekun dalam pelaksanaan sehingga tercapainya tujuan yang telah direncanakan bersama.
4. Pengawasan adalah proses mengamati, menilai dan mengevaluasi setiap langkah perencanaan agar berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam aktivitas pengawasan seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam menganalisa serta memeriksa dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan bawahannya, dan itu menjadi salah satu tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tersebut. (Mantiri, 2014)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan – laporan dokumen yang terkait dengan penerapan Peran Pemerintah Dalam

Pembangunan Jalan Lintas Sekapas – Sekeladi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2023.

Sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian,

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SEKAPAS – SEKELADI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022-2023.

1. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Jalan Lintas Sekapas-Sekeladi Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah bahwa perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Pembangunan juga diartikan sebagai proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Perencanaan pembangunan perlu diwujudkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah langkah awal yang harus diperbuat dalam sebuah organisasi dalam memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan dalam hal ini mencakup kegiatan pengambilan keputusan. Tahap awal yang harus dilakukan adalah merencanakan suatu program yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau perusahaan. Perencanaan dilakukan

berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari pihak kedua atau dari sumber lain yang sudah tersedia. untuk mencapai tujuan atau misi yang diinginkan.

Pembangunan ini dilaksanakan atas dasar visi dan misi yang tercantum pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2021-2026 dan tertera pada Peraturan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir nomor 04 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Yang mana visi Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu “Menuju Rokan Hilir yang maju, religius dan berbudaya berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal

Selain terdapat visi, Kabupaten Rokan Hilir juga menetapkan misi Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar wilayah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di rokan hilir. Menyiapkan sumber daya yang unggul, berbudaya dan berdaya saing dengan berbasis nilai-nilai religi. Meningkatkan mutu dan layanan dasar yang berkualitas kepada masyarakat rokan hilir. Meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal daerah (pertanian, peternakan,

kelautan perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif). Serta Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien berbasis teknologi.

Visi Misi yang tertulis di atas merupakan penjabaran dari visi misi Bupati selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dijadikan dasar sekaligus pedoman dalam melakukan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang terhitung sejak tahun 2021-2026. jalan Desa Sekapas-Sekeladi tersebut tercantum pada SK jalan Kabupaten Rokan Hilir Nomor 255 tahun 2018 tercatat dengan nama Jalan Lintas Sedingin Rantau Kopar yang melalui Kecamatan Rantau Kopar dan Kecamatan Tanah Putih dengan panjang Ruas 25,86 kilometer, Jalan lintas Sekapas-Sekeladi tersebut dibangun mulai dari Tahun 2021-2023 dan setiap tahunnya dianggarkan untuk pembangunan jalan tersebut. Untuk pendanaan, dana yang dianggarkan dalam pelaksanaan pembangunan jalan lintas Sekapas-Sekeladi ini yaitu bersumber dari dana APBD Tahun anggaran 2021-2023 Yang mana dana untuk tahun 2022 sebesar Rp.15.571.921.959,00 dengan PT.Fatma Nusa Mulia yang diawasi oleh CV. Irvotek Riau Konsultan dan untuk tahun 2023 sebesar Rp. 3.397.831.571,02 dengan CV. Amirah Konsultan serta pelaksananya CV. Tk Group”.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengelompokkan sebagaimana orang didalamnya dapat digerakkan sesuai aturan dan sesuai rencana dalam

mencapai tujuan. Maka dalam hal ini perlu adanya perencanaan yang baik dalam membuat sebuah struktur organisasi karena sangat berdampak pada proses keberhasilan.

Kondisi sumber daya manusia yang tersedia dalam pelaksanaan program untuk saat ini masih minim yang mana Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun tenaga ahli dalam Pembangunan jalan lintas Sekapas-Sekeladi masih dikatakan kurang maksimal. Sumber daya yang tersedia tidak konsisten dalam bekerja di lapangan. Hal tersebut membuat pembangunan ditahun ini agak tersendat, karena di posisi saat ini banyak sumber daya yang tidak sinkron maksudnya banyak posisi tenaga ahli yang tidak sesuai dengan bidang mereka dan juga terkendala dikarenakan cuaca yang tidak menentu. Kemudian bupati berkomitmen dalam pembangunan jalan lintas Sekapas Sekeladi ini, dilihat dari anggaran yang setiap tahunnya yang dialokasikan untuk pembangunan jalan lintas Sekapas Sekeladi tersebut, walaupun tidak tuntas secara keseluruhan. Dikarenakan adanya pemerataan pembangunan yang dibagikan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan hilir.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tindakan dari seorang pemimpin yang membimbing serta mengarahkan dan menggerakkan seluruh anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan baik dan tekun dalam pelaksanaan sehingga tercapainya tujuan yang telah direncanakan bersama. Tahap ketiga merupakan aplikasi atau pelaksanaan

dari berbagai perencanaan yang sudah di organisasikan.

kondisi sekarang jalan desa Sekapas mau menuju kearah desa Sekeladi juga putus dikarenakan bencana alam yaitu banjir, dan itu tidak bisa kita prediksi, yang pasti murni karna bencana alam. Tapi sekarang masyarakat berinisiatif membuat jembatan penghubung seadanya yang para pelintasnya membayar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah) satu kendaraan untuk sekali lewat. Dan untuk saat ini juga sudah kami usulkan ke pihak Kabupaten untuk sesegera mungkin diperbaiki, dan kemungkinan tahun 2025 sudah dibangun. Dari pihak Desa Sekapas juga mengusulkan untuk membuat jembatan saja karena ini jika masih dibuat jalan tidak memungkinkan untuk bertahan lama, karena titik jalan rusak tersebut memang harus dibangun jembatan karna disitu tempatnya aliran sungai yang arus alirannya sangat kencang.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah proses mengamati, menilai dan mengevaluasi setiap langkah perencanaan agar berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam aktivitas pengawasan seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam menganalisa serta memeriksa dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan bawahannya, dan itu menjadi salah satu tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tersebut.

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Rokan Hilir telah menunjuk konsultan pengawas untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan tersebut di samping itu dinas pekerjaan umum

dan penataan ruang Kabupaten Rokan Hilir turut serta melakukan pengawasan pada pelaksanaan jalan tersebut, serta Dinas PU juga melakukan survei setiap tahunnya, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan jalan lintas Sekapas Sekeladi ini Dinas PUTR menjelaskan perencanaan pada pembangunan jalan tersebut sesuai dengan kontrak dilampirkan.

2. Faktor Penghambat Pembangunan Jalan Lintas Sekapas-Sekeladi Kabupaten Rokan Hilir

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan jalan sekapas – sekeladi adalah :

1. faktor dari bencana alam dan anggaran yang ada

Faktor bencana alam menyebabkan pelaksanaan pembangunan yang sudah di rancang atau di rencanakan pemerintah mengalami hambatan dalam proses pengerjaannya terutama mengenai waktu pengerjaan pembangunan karena tidak mungkin saat kondisi banjir pembangunan jalan di lanjutkan dan beberapa jalan juga mengalami kerusakan, pihak pemerintah juga sulit untuk secara rutin melakukan pengawasan dalam pengerjaan pembangunan jalan dikarenakan kondisi jalan, pihak pemerintah juga sudah berupaya untuk terus menjalankan pembangunan ini dan mengupayakan dana untuk berjalannya pembangunan yang menjadi terkendala akibat bencana alam dan kurangnya fasilitas pendanaan dari pemerintah.

Faktor cuaca atau bencana seperti banjir yang membuat

pelaksanaan pembangunan ini terhambat dan sulit untuk pemerintah melakukan pengawasan dikarenakan kondisi jalan yang terputus, pemerintah juga mengalami kendala dalam bidang pendanaan yang ditaksir masih kurang memadai dalam pembangunan.

2. kurangnya komitmen dari pemerintah dalam pembangunan akses transportasi yang dibutuhkan masyarakat.

Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong S.IP mengatakan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir secara konsisten menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas yang dilaksanakan setiap tahunnya. Fakta di lapangan konsistensi pembangunan jalan Desa Sekapas-Sekeladi oleh Pemerintah Kabupaten Rokan hilir belum terlaksana secara maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan terkait Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Jalan Lintas Sekapas – Sekeladi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2023. Maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembangunan jalan ini dilaksanakan atas dasar visi dan misi saat pemilihan Bupati dan wakil bupati pada tahun 2021-2026 dan tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pendanaan jalan ini di anggarkan dari APBD tahun anggaran 2022-2023 yaitu sebesar Rp.15.571.921.959,00 dengan PT. Fatma Nusa Mulia yang diawasi oleh CV. Irvotek Riau

Konsultan dan untuk tahun 2023 sebesar Rp. 3.397.831.571,02 dengan CV. Amirah Konsultan serta pelaksananya CV. Tk Group. Pihak Kecamatan tidak ikut serta secara langsung di dalam pembangunan fisik jalan lintas Sekapas Sekeladi tersebut namun pihak Kecamatan turut serta berkontribusi dalam mensukseskan pembangunan jalan tersebut khususnya dalam hal sosial kemasyarakatan. Program perencanaan untuk pembangunan ruas jalan lintas Sekapas Sekeladi ini ditargetkan mencapai kemantapan 100% namun dalam pelaksanaannya direncanakan secara bertahap sesuai dengan alokasi dana yang tersedia. Akan tetapi yang menjadi penghambat dalam perencanaan pembangunan jalan ini yaitu faktor anggaran yang masih kurang memadai untuk pembangunan jalan Lintas Sekapas-Sekeladi tersebut. Kondisi sumber daya manusia yang tersedia dalam pelaksanaan program untuk saat ini masih minim yang mana Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun tenaga ahli dalam pembangunan jalan lintas Sekapas-Sekeladi masih dikatakan kurang maksimal, sumber daya yang tersedia tidak konsisten dalam bekerja di lapangan. Hal tersebut membuat pembangunan ditahun ini agak tersendat, karena di posisi saat ini banyak sumber daya yang tidak sinkron maksudnya banyak posisi tenaga ahli yang tidak sesuai dengan bidang mereka dan juga terkendala dikarenakan cuaca yang tidak menentu. Kemudian Bupati

berkomitmen dalam pembangunan jalan lintas Sekapas Sekeladi ini, dilihat dari anggaran yang setiap tahunnya yang dialokasikan untuk pembangunan jalan lintas Sekapas Sekeladi tersebut, walaupun tidak tuntas secara keseluruhan dikarenakan adanya pemerataan pembangunan yang dibagikan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Banyak pihak yang telah berkontribusi dalam terwujudnya pembangunan ruas jalan ini yakni Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pelaksana, badan perencanaan pembangunan daerah riset dan inovasi daerah, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah pihak Kecamatan dan kepulauan serta masyarakat setempat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan ini sudah sepenuhnya bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan setiap tahapan dalam proses perbaikan jalan yang akan dilakukan. Akan tetapi ada faktor yang menjadi penghambat dalam perngorganisasian kegiatan ini yaitu sulitnya masyarakat untuk mengkonfirmasi keluhannya kepada pihak dinas untuk mengusut tenaga ahli kerja pembangunan jalan lintas ini. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Rokan Hilir telah menunjuk konsultan pengawas untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan tersebut di samping itu dinas

pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Rokan Hilir turut serta melakukan pengawasan pada pelaksanaan jalan tersebut, serta Dinas PU juga melakukan survei setiap tahunnya, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan jalan lintas Sekapas Sekeladi ini Dinas PUTR menjelaskan perencanaan pada pembangunan jalan tersebut sesuai dengan kontrak dilapangan. Akan tetapi ada beberapa pihak yang mengeluhkan soal pengawasan dari pemerintah atau hal yang menghambat kegiatan ini.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan ini adalah adanya faktor bencana alam seperti banjir dan jalan yang terputus. Adanya faktor dana yang kurang memadai yang diberikan pemerintah untuk pembangunan serta kurangnya komitmen yang tegas oleh pemerintah dalam pelaksanaan ini sehingga pelaksanaan proses pembangunan jalan ini belum terselesaikan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka peneliti mengemukakan saran-saran antara lain:

1. Pemerintah Desa Sekapas-Sekeladi dirasa perlu untuk melaporkan kembali dan menanyakan terkait kabar kepastian perbaikan ruas jalan lintas Sekapas-Sekeladi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Rokan Hilir.

Mengingat ruas jalan tersebut yang rusaknya makin parah. Maka dari itu perlunya konfirmasi kembali terkait hal tersebut agar pembangunan tersebut dapat terealisasi dengan segera,

2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus lebih tanggap lagi terhadap permasalahan yang ada dan lebih konsisten dalam menyelesaikan pengerjaan pembangunan infrastruktur jalan rusak yang ada di setiap Kecamatan. Serta lebih memprioritaskan jalan yang daerahnya mengalami kerusakan parah. Langkah ini harus dengan segera ditempuh demi kenyamanan dan kelancaran mobilitas dari masyarakat. Serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir perlu untuk menjaga kesigapan dalam menjawab setiap laporan masyarakat terkait jalan rusak di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir dan berusaha menanggulunginya dengan segera walaupun dengan penanganan sementara terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung Afandi, Syed, Afandi, Muslim, Erdayanti, R. (2022). *Teori Pembangunan* (N. Hidayat Afandi (ed.)). Bintang Semesta Media.
- Fitri Meutia, Ph.D., I. (2017). *Analisis Kebijakan Publik* (Moh. Nizar (ed.)). CV. Anugrah Utama Raharja.
- Karsadi, M.Si., P. D. (2018). *Metodologi Penelitian*

Sosial Antara Teori dan Praktik (Riyanto (ed.)). Pustaka Pelajar.

- Kato, Iskandar, dkk. (2014). Manajemen Pembangunan Daerah. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Zainal, Veithzal Rivai, Hadad, Muliawan Darmansyah, Ramly, M. (2017). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Kasmad, R. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66.
- Komara Mady, Y. (2023). *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang Dalam Pembangunan Jalan*.
- Laary, Yurensi, Tulusan, F.M.G., Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Administrasi Publik*, VIII, 63.
- Mursal, A. (2019). *Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Desa*

- Soreang Kabupaten Takalar.*
- Nas, J. (2015). Diskursus Kepemimpinan Pemerintahan Kontemporer *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8, 1–8.
- Purnamasari, Hanny, Ramdani, R. (2018). Manajemen Pemerintah dalam Pembangunan Desa di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. *Ilmu Pemerintahan*, 04, 162–170
- Sadikin, S., Hannan, S., & Sunani, U. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda. *Journal*
- Savitri, N. B. (2020). *Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur Air Bersih di Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018.*
- Sumiati, R. (2016). Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau. *Ilmu Administrasi Negara*, 5, 3.
- Sutrianika. (2022). Pelaksanaan Pembangunan di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuntan Singingi Tahun 2019-2020. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.*
- Taufiq, O. H., Wardani, A. K., & Galuh, U. (2020). Karakter Kepemimpinan Ideal. *Jurnal MODERAT*, Volume 6, Nomor 3, 6, 513–524.

Website

- https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_da_n_indonesia_maju
- https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-uu-no-22-tahun-1999-tentang-pemerintahan-daerah/UU-31-27-uu22_1999.htm
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- <https://jdih.rohilkab.go.id/detail/peraturan/555/rencana-pembangunan-jangka-menengah-daerah-kabupaten-rokan-hilir-tahun-2021-2026.html>
- <https://jdih.rohilkab.go.id/index.php/detail/peraturan/283/penamaan-jalan-di-wilayah-kabupaten-rokan-hilir.html>
- <https://rantaukopar.rohilkab.go.id/pages/profil-singkat>
- <https://targetnews.id/jalan-desa-sekeladi-rohil-rusak-parah-dpp-spkn-desak-pemkab-rohil-segera-perbaiki/>
- <https://seribukubah.com/2023/05/18/terkait-jalan-rusak-di-desa-sekeladi-rohil-kadis-putr->

- ini-sudah-prioritas-kami/
<https://riaubernas.com/news/detail/11780/dituding-jalan-sekeladi-2-tahun-belum-di-perbaiki-ini-dia-penjelasan-kadis-putr-rohil>
<https://aktualbersuar.id/2023/10/03/wow-bertahun-menanti-jalan-bagus-akhirnya-masyarakat-apresiasi-dan-ucapkan-terimakasih-ke-bupati-rohil/>
<https://www.jetsiber.com/read-6601-2023-03-20-jalan-desa-sekeladi-rohil-sangat-rusak-parah-dppspkn-desak-pemkab-rohil-agar-segera-lakukan-perbaikan.html-sthash.kuJMfQOS.dpbs>
<https://tvnyaburuh.com/berita/15-miliar-lebih-pembangunan-jalan-sekaladi-sekapas-putr-di-pertanyakan/>
<https://www.kabariau.com/berita/8922/rusak-parah-jalan-satu-satunya-penghubung-dua-desa-di-desa-sekeladi-rohil-minta-diperbaiki>
<https://nadariau.com/2022/10/19/pembangunan-jalan-lintas-sekapas-sekeladi-dengan-anggaran-15-miliar-lebih-dari-putr-rohil-zulkifli-sebut-tidak-ada-pengawas-konsultan-dan-tenaga-ahli-di-lokasi/>
<https://suarariaupos.com/?ms=newsdetail&idd=32653&j=respons-cepat-bupati-rohil-kadis-puprtinjau-langsung-jalan-lintas-sekeladi-sekapas-yang-rusak-diterjang-banjir>
<https://rantaukopar.rohilkab.go.id/detailpost/jalan-rantau-kopar-sekapas-terputus-karena-banjir-bupati-rokan-hilir-segera-respon>
<https://suarariaupos.com/?ms=newsdetail&idd=32648&j=bupati-rohil-box-culvert-akibat-erosi-banjir-di-jalan-lintas-sekeladi-sekapas-segera-diperbaiki>
- Peraturan perundang-undangan**
Undang-undang Dasar Tahun 1945
Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2022 Tentang Jalan
Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan di Indonesia
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor. 94 Tahun 2018 Tentang Penamaan Jalan di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir

SK Kabupaten Rokan Hilir
No. 255 Tahun 2018 Tentang
Penetapan Ruas Jalan di
Kabupaten Rokan Hilir